

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN (OKUS)**

Skripsi



**Nama : Faisal Trinaldi
NIM : 222015181**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN (OKUS)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Faisal Trinadi

NIM : 222015181

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Trinaldi
NIM : 222015181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Denga ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2019
Yang membuat pernyataan



Faisal Trinaldi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah
Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .
Nama : Faisal Trinaldi
NIM : 222015181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0002095507/972321

Pembimbing II,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0029097804/1197277

Mengetahui,
Dekan

r.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E.AK., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Barang siapa yang mengikuti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga”

[HR. Muslim]

“Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, dengan pilihan yang benar dia akan bersinar”
(Chairul Tanjung)

“Berangkatlah dengan penuh keyakinan, berjalanlah dengan penuh keikhlasan, istiqomahlah dalam menghadapi cobaan, dan bawalah kemenangan itu pulang”

(Penulis)

(Faisal Trinaldi)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibuku dan Alm. Ayahku
- Kakak dan adik-adikku
- Dosen Pembimbing Skripsiku
- Angkatan 2015 Prodi Akuntansi
- Teman KKN Posko 233 Desa Pematang Palas
- Almamater Kebangaanku

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas segala nikmat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah dalam Upaya Meningkatkan pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan" untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai gelar sarjana S1.

Sebagai calon sarjana harus peka terhadap lingkungannya, termasuk menanggapi fenomena yang terkait dengan peningkatan pendapatan iuran retribusi pemerintah. Sebagai calon sarjana akuntansi, penulis mencoba untuk berkontribusi dengan melakukan penelitian mengenai kaitannya dengan permasalahan ini, dengan memasukkan variable efektivitas retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, serta bab simpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dalam 3 tahun, hanya pada tahun 2018 yang dikategorikan cukup efektif tetapi di tahun 2018 masih ada 2 jenis kategori retribusi daerah yang dikategorikan kurang efektif. Kontribusi retribusi daerah dalam tiga tahun dikategorikan sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara ada 3 penyebab tidak

tercapainya penerimaan retribusi daerah yaitu : struktur perekonomian, kesadaran masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayahku (Fadillah) dan ibuku tercinta (Siti Rahma) yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu mendidik, mendoakan, membiayai, menemani dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan terjadi dan terselesaikan tanpa adanya do'a dan bimbingan dari kedua orang tuaku. Untuk keempat kakak dan satu adik penulis, Febriansyah, Cici Anggraini, Sukis Woro, Eva Silvia Oktarina dan Fatika Gusti Ananda, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih untuk doanya dan terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si.,C.A dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Fauzi Ridwan S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dsan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E., M.Si., AK., CA dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si. selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Seluruh Dosen-Dosen Pengajar Pengajar di Universitas Muhamadiyah
5. Pimpinan, staf, serta karyawan/karyawati Universitas Muhamadiyah Palembang
6. Pimpinan, staf, serta karyawan/karyawati Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Agustus 2019
Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN DEPAN/COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| HALAMAN PRAKATA | vi |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | ix |
| HALAMAN DAFTAR TABEL..... | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| HALAMAN ABSTRAK | xvi |
| HALAMAN ABSTRACT | xvii |
| BAB.I PENDAHULUAN | |
| A.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B.Rumusan Masalah | 11 |
| C.Tujuan Penelitian | 12 |
| D.Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB. II KAJIAN PUSTAKA | |
| A.Landasan Teori | 13 |
| 1. Efektivitas | 13 |
| 2. Kontribusi | 16 |
| 3. Pendapatan Asli Daerah..... | 17 |

| | |
|---|----|
| 4. Retribusi Daerah..... | 20 |
| a. Pengertian Retribusi Daerah..... | 20 |
| b. Objek Retribusi Daerah..... | 21 |
| c. Subjek Retribusi Daerah | 24 |
| d. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah | 24 |
| e. Pemanfaatan Retribusi Daerah | 25 |
| 5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah | 25 |
| 6. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi upaya Peningkatan Pendapatan Daerah | 27 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 28 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Lokasi Penelitian | 31 |
| C. Operasionalisasi Variabel | 32 |
| D. Data yang Diperoleh..... | 33 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 33 |
| F. Analisis Data dan Teknis Analisis | 35 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | 37 |
| 1. Sejarah Singkat BPPRD OKU Selatan | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Struktur Organisasi BPPRD OKU Selatan | 39 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD OKU Selatan | 40 |
| a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD | 40 |
| b. Uraian Tugas dan Unsur Dinas..... | 41 |
| 4. Visi dan Misi BPPRD OKU Selatan..... | 47 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 48 |
| 1. Perhitungan Analisis Epektifitas Retribusi Daerah Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 48 |
| a. Tahun 2016 | 48 |
| b. Tahun 2017 | 48 |
| c. Tahun 2018 | 55 |
| 2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Retribusi Daerah..... | 56 |
| a. Terjadinya keterbatasan sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan..... | 56 |
| b. Masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan | 57 |
| 1) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi | 57 |
| 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan | 57 |

| | |
|--|----|
| 3. Perhitungan Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Pada Kabupaten | |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 58 |
| a. Tahun 2016 | 58 |
| 1) Retribusi Jasa Umum..... | 58 |
| 2) Retribusi Jasa Usaha..... | 59 |
| 3) Retribusi Perizinan Tertentu | 59 |
| b. Tahun 2017 | 59 |
| 1) Retribusi Jasa Umum..... | 60 |
| 2) Retribusi Jasa Usaha..... | 60 |
| 3) Retribusi Perizinan Tertentu | 61 |
| c. Tahun 2018 | 61 |
| 1) Retribusi Jasa Umum..... | 62 |
| 2) Retribusi Jasa Usaha..... | 62 |
| 3) Retribusi Perizinan Tertentu | 62 |
| 4. Analisis Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan | |
| Retribusi Daerah..... | 68 |
| a. Intensifikasi | 68 |
| 1) Melakukan Sosialisasi Tentang Pentingnya | |
| Membayar Iuran Retribusi Daerah..... | 68 |
| 2) Penertiban Parkir | 68 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 3) Mengadakan Event-Event..... | 69 |
| b. Ekstensifikasi | 69 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|------------------|----|
| A.Simpulan | 71 |
| B.Saran | 72 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-------------|--|
| Tabel I.1 | Target dan Realisasi Retribusi Daerah OKUS 10 |
| Tabel I.2 | Target dan Realisasi Jenis-Jenis Retribusi Daerah OKUS 11 |
| Tabel II.1 | Kriteria Kinerja Keuangan 15 |
| Tabel II.2 | Klsifikasi Kriteria Kontribusi 16 |
| Tabel II.3 | Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 30 |
| Tabel III.1 | Overasional Variabel..... 32 |
| Tabel IV.1 | Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah 2016-2018..... 50 |
| Tabel IV.2 | Efektivitas Semua Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2018..... 51 |
| Tabel IV.3 | Kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2016-2018..... 63 |
| Tabel IV.4 | Kontribusi Jenis-Jenis Retribusi Daerah 64 |
| Tabel IV.5 | Kontribusi Semua Jenis Retribusi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2018.....66 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Peneliti
- Lampiran II Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghapal AL-Qur'an
- Lampiran III Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran IV Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran V Biodata Penulis

ABSTRAK

Faisal Trinaldi/ 22 2015 181 /Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Oku Selatan (OKUS).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa tidak efektifnya retribusi daerah dan bagaimana kontribusi retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Oku Selatan (OKUS). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi langsung dengan para pegawai BPPRD mengenai faktor penyebab tidak efektifnya retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dokumentasi diperoleh dari catatan atau data masa lalu yaitu data Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis data deskriptif yang menyajikan uraian penjelasan tentang bagaimanakah efektivitas dan kontribusi retribusi daerah pada kabupaten oku komering ulu selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, dan 2017, penerimaan retribusi daerah dikategorikan kurang efektif mencapai 49,92%, 67,79%, dan tahun 2018 dikategorikan cukup efektif yang mencapai 82,57%, serta faktor penyebab tidak efektifnya retribusi daerah terdiri dari Terjadinya keterbatasan sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan serta Masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan dan upaya yang dilakukan pemerintah terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kontribusi dari retribusi daerah dalam tiga tahun dikategorikan kurang efektif.

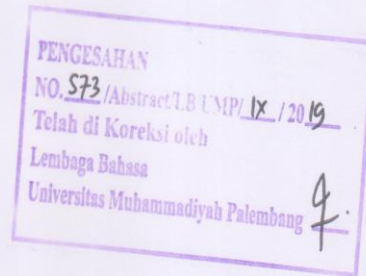
Kata Kunci : efektivitas retribusi daerah, kontribusi retribusi daerah

Abstract

Faisal Trinaldi/22 2015 181/The Analysis of the Effectiveness and Contribution of Regional Levy in Efforts to Increase Local Revenue (PAD) in Kabupaten Oku Selatan (OKUS).

The purpose of this research was to find out why ineffective regional levy and how the contribution of regional levy in effort to increase local revenue (PAD) in kabupaten Oku Selatan (OKUS). Data collection methods used in this research were interview and documentation. Interview with direct communication with BPPRD employees regarding the factors causing ineffective regional levy in effort to increase local own-source revenue (PAD). Documentation was obtained from past record or data namely Regional Revenue Data 2016 - 2018. The analysis technique used was descriptive data analysis that presented a description of effectiveness and contribution of regional levy in kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. The result showed that in 2016 and 2017, the reception of regional levy was categorized as less effective reaching 49.92%, 67.79%, and in 2018 it was classified as enough effective which reached 82.57%. The factors causing ineffective levy were the occurrence of limited resources or operational implementation officers in the field as well as the level of leakage or breakthrough while the efforts made by the government consists of intensification and extensification, as well as the contribution of regional retribution in three years could be categorized as less effective.

Keywords: the effectiveness of regional levy, regional levy contribution



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan 23 tahun. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB). Sejauh ini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 Kota. Kelahiran DOB memicu daerah-daerah lain untuk menuntut pemekaran. Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menerima 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran daerah jika ingin memberikan usulan pemekaran harus melalui kajian dan telah mendalam. Secara umum, otonomi daerah telah berjalan dengan baik. Daerah-daerah dapat membangun dan menggali potensinya dengan menyerap dan melibatkan masyarakat. Tentu saja juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Sebetulnya otonomi daerah sudah pada jalan yang benar. Tetapi memang ada berbagai hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang tak bisa kita hindari. Seperti persoalan lemahnya kapasitas, baik personal, kelembagaan, apalagi pembiayaan. Inilah persoalan klasik yang selama ini dianggap persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai persoalan itu harus dievaluasi dan dijadikan bahan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada,” kata Akmal Malik, Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, kata Akmal, belum terlihat *local wisdom* atau kearifan lokal mewarnai otonomi daerah kita. “Saya melihat otonomi daerah masih pendekatan-pendekatan

normatif semata. Terlalu kaku. Tidak berani mengedepankan *local wisdom* dalam mengelola urusan-urusan yang diberikan pusat kepada mereka. Ini karena persoalan kapasitas.”

Dalam menjalankan wewenangnya, daerah memiliki hak untuk menentukan tatacara yang sesuai dengan keinginan masyarakat, perkembangan zaman, dan kearifan lokal, yang hidup di masing-masing daerah. Dengan demikian, masing-masing daerah memiliki peluang melahirkan berbagai inovasi dan terobosan model atau mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian tak kehilangan makna kebinekaan sebagai bangsa.

Memang muncul inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi masih kurang. Oleh karena itu kita berharap semakin banyak daerah yang menciptakan inovasi-inovasi dalam mengelola daerahnya,” Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil meraih kinerja terbaik secara nasional, sehingga layak mendapatkan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sukses mendapatkan prestasi kinerja tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada Kepala Daerah berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017

Sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu desentralisasi, maka pembangunan bangsa ini di mulai dari pembangunan daerah/provinsi. Masing-masing daerah menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya yang nantinya akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan adanya otonomi daerah menjadikan pemerintahan daerah menjadikan pemerintah daerah dapat mengatur jalannya pemerintahan di daerah pimpinannya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Maka demikian kerja pemerintah pusat dapat lebih fokus ke arah perumusan kebijakan makro.

Perkembangan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terttuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum” sehingga pembangunan yang ada didaerah erupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi disetiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada pemerintah

daerah untuk membuat kebijakan keuangannya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Salah satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintahan daerah adalah instansi yang paling mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri.

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun diikuti dengan naiknya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang harus diperhatikan, upaya pemecahan masalah dan pembangunan tersebut menuntut peningkatan peran pemerintah dengan meningkatkan pula dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah pusat mempunyai kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara sedangkan pemerintahan daerah masih dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber penerimaan, sehingga ketergantungan terhadap pemerintahan pusat masih mendominasi pembiayaan daerah. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi

yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan suatu cara memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan salah satu kebijakan pemerintah menunjang otonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, baik pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten dan Kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri dan dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian suatu daerah sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan. Berdasarkan itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

Menurut Beni (2016: 76), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya mencapai tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio

perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

Menurut Mulyana (2018), kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mardiasmo (2018: 18-22), objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terhutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur, dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat

penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karna profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien.

Menurut Damas (2018: 18-19), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah-daerah yang memiliki PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang walaupun demikian, pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan efektivitas dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, Mulyana (2018) dan Wayan, dkk (2017). Penelitian Mulyana menyatakan bahwa Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu 2011-2015 dikatakan kurang efektif yaitu dengan rata-rata 79,22%, sedangkan penelitian Wayan menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pajak di Kabupaten Gianyar di atas 100%, sehingga dinyatakan sangat efektivitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mourin (2013), hasil analisis penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut: hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang. Hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Tahun 2010 dan tahun 2011, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. Kembali pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2008-2012 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target. 3 (tiga) kali di bawah target dan rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. sesuai dengan kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 70,38%, sedangkan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012 dengan memperoleh 61,11%, dan kontribusi penerimaan retribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan memperoleh 8,35%, sedangkan tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan memperoleh 11,64%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rryfall (2015), hasil penelitian menyatakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten bantul sangat efektif, dan rasio kontribusi pajak daerah dapat dikatakan (fluktuaktif)

yaitu turun naik sedangkan rasio kontribusi retribusi daerah cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2016). hasil penelitian menyatakan bahwa hasil regresi menunjukkan kontribusi komponen PAD yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel I.1
Taget dan Realisasi Retribusi Dearah

| No | Tahun | Target Retribusi Daerah | Realisasi Retribusi Daerah | Efektivitas (%) |
|----|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2016 | 6.169.000.000,00 | 2.894.609.350,00 | 46,92% |
| 2 | 2017 | 5.517.000.000,00 | 3.740.197.550,00 | 67,79% |
| 3 | 2018 | 6.371.000.000,00 | 5.260.553.922,00 | 82,57% |

Sumber : BPPRD, Kab. Oku Selatan

Berdasarkan Tabel I.1, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2018 realisasi PAD secara umum memang sudah lebih besar dari pada tahun 2016 dan 2017, tetapi dalam rincian jenis retribusi daerah tahun 2018 ada jenis retribusi yang belum dikategorikan efektif atau kurang efektif.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Jenis-Jenis Retribusi Daerah tahun 2018

| No | Jenis Retribusi | Target | Reliasasi | Efektivitas (%) |
|----|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Jasa Umum | 5.635.000.000,00 | 4.783.122.672,00 | 84,88% |
| 2 | Jasa Usaha | 576.000.000,00 | 366.150.000,00 | 63,57% |
| 3 | Perizinan Tertentu | 160.000.000,00 | 111.281.250,00 | 69,55% |

Sumber: BPPRD, Kab. Oku Selatan

Berdasarkan Tabel I.2 dapat dilihat bahwa dari 3 jenis kategori retribusi hanya retribusi jasa umum yang dapat dikatakan cukup efektif karena nilai efektivitasnya sebesar 84,88%, sedangkan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dikategorikan kurang efektif karena nilai efektivitasnya kurang dari 80%.

Berdasarkan dari fenomena dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas kontribusi dari retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengangkat judul **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Oku Selatan (OKUS)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa tidak efektifnya retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu?

2. Bagaimanakah kontribusi retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Oku Selatan (OKUS)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa tidak efektifnya Retribusi Daerah dan Bagaimanakah Kontribusinya Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi penulis tentang upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah guna untuk melaksanakan otonomi daerah.

2.. Bagi Instansi

Bagi pemerintahan daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Oku Selatan mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia
- Damas Dwi Nugroho. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mourin M. Mousal. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manado. *Jurnal EMBA* Vol.1 No. 4 Hal 374-382. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+retribusi+daerah+manado&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D-Gryr9yU5sJ)
- Mulayana Utami dan Endang Surestyo Ningsih. 2018. Analisis Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah* Vol. 3.No 4, 672-682. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+mulyana+utami&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DLpGpr2Z8AiYJ)
- Ni Wayan Ari sucanti, Putu Sukma, dan Gusti Ayu Purnamawati 2017 Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Gianyar). *Jurnal Akuntansi* Vol.8. No.2 Hal 14-23. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=studi+analisis+efektivitas%2c+efisiensi+dan+kontribusi+penerimaan+pajak+daerah+dan+retribusi+daerah+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DvAQ9ifP4E8YJ).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Riandani Rezki Prana. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No.2 Hal 21-32. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+riandani+rizki&btnG=#gs_qabs&u=%23p%3DhQ63KNYmmAQJ)
- Ryfal Yoduke dan Sri Ayem. 2015. Analisis Efektivitas, Efesiens Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi* Vol.3 No.2 Hal 28-47 (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+ryfal+yoduke&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dajlh3yUB910J)
- Siti Kurnia Rahayu (2017) *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Stevanus J. Gomes Dkk. 2011. Analisis Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Maluku Tenggara. *Jurnal Akuntansi* Vol.13 No 2 Hal 175-183. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+retribusi+daerah+Maluku+tenggara&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dt-86jqQZuEwJ)
- V. Wiratna Sujarweni. (2014) *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta